

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH  
UNTUK MENGUKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2019-2023**

M. Farid Duddin Al Fajr

NPP. 32.0758

*Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0758@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0758@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Komaedi, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Fiscal independence is a crucial indicator in the implementation of regional autonomy, reflecting the local government's ability to finance development needs independently through Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD). Tanah Laut Regency still faces challenges in increasing the contribution of PAD to regional revenues, resulting in suboptimal fiscal independence. **Purpose:** This study aims to analyze the fiscal independence of Tanah Laut Regency through PAD, identify the inhibiting factors, and explore the local government's efforts to improve fiscal independence. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews with officials from the Regional Revenue Agency and tax managers, along with documentation of regional financial reports. Data analysis refers to four financial ratios according to Mahmudi (2019): degree of decentralization, financial dependency, fiscal independence, and PAD effectiveness. **Result:** The analysis reveals that Tanah Laut Regency is not yet fiscally independent, with average ratios of 10.42% for degree of decentralization, 82.26% for financial dependency, 11.95% for fiscal independence, and 91.73% for PAD effectiveness. The main inhibiting factors include low PAD revenue, outdated tax databases, and low taxpayer awareness and compliance. Efforts to improve include digitalization of tax collection, optimization of new PAD sources, and enhancement of transparency and accountability in financial management. **Conclusion:** Fiscal independence in Tanah Laut Regency remains low and requires an integrated strategy involving strengthening tax collection capacity, updating data, taxpayer education, and innovative development of PAD sources to reduce dependency on transfer funds from the central government. **Keywords:** Ratio of Decentralization, Dependency, Fiscal Independence, Effectiveness

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sehingga kemandirian keuangan belum tercapai secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Tanah Laut melalui Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menggali upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah dan pengelola pajak, serta dokumentasi laporan keuangan daerah. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat rasio keuangan menurut Mahmudi (2019), yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut belum mandiri secara keuangan dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 10,42%, ketergantungan keuangan 82,26%, kemandirian keuangan 11,95%, dan efektivitas PAD 91,73%. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya perolehan PAD, database pajak yang belum mutakhir, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan meliputi digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi sumber PAD baru, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. **Kesimpulan:** Kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Laut masih rendah dan membutuhkan strategi terpadu berupa penguatan kapasitas pemungut pajak, pemutakhiran data, edukasi wajib pajak, serta inovasi pengembangan sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat..

**Kata kunci:** Derajat Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian, Efektivitas

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Christia & Ispriyarso (dalam Bahasoan dkk., 2024) menyampaikan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Muhlisin dkk. (2025) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Australia. Penelitian oleh Haslam McKenzie dan Eyles (2024) mencatat bahwa “pemerintahan daerah di Australia memiliki kekuatan fiskal yang lemah karena kekuasaan fiskal terkonsentrasi di tingkat federal dan negara bagian,” sehingga membatasi kemampuan daerah dalam membangun kapasitas keuangan dan mengelola risiko secara mandiri.

Hanya daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendirilah yang memperoleh manfaat nyata dari desentralisasi (Bargain dkk, 2023). Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian ini tercermin dari seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Saleh, 2020).

Kemandirian keuangan daerah menjadi krusial dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PAD merupakan komponen

pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki suatu daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Laut, masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kabupaten Tanah Laut yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, serta pariwisata. Namun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa kontribusi PAD hanya berkisar antara 11% hingga 17%, sementara sisanya masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Kondisi ini menjadi sinyal lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari potensi lokal.

Kondisi ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya kemandirian fiskal daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembangunan. Ketergantungan terhadap dana transfer yang bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kebijakan pusat dapat menghambat kelangsungan program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai kinerja PAD dan sejauh mana kontribusinya dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Pemerintahan daerah yang efektif, akan melahirkan prakarsa-prakarsa untuk perbaikan administrasi pemerintahan yang pada gilirannya memperkuat pembangunan ekonomi daerah (Azikin, 2018).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan penelitian (GAP) yang mendasari studi ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah, yakni hanya berkisar antara 11% hingga 17% selama periode 2019–2023. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroati daerah dengan PAD tinggi atau menggunakan pendekatan makro secara nasional, sehingga belum memberikan gambaran empirik yang mendalam mengenai kondisi daerah dengan potensi besar namun bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur serta memberikan gambaran aktual mengenai kinerja PAD dan tingkat kemandirian fiskal daerah secara lebih spesifik dan kontekstual di Kabupaten Tanah Laut.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Saleh (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, namun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru memiliki pengaruh negatif; penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif multivariat regresi di wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, Malau & Simarmata (2020) meneliti 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan,

namun belanja modal justru berdampak negatif secara signifikan; penelitian ini memperluas cakupan dengan pendekatan data panel. Berbeda dengan itu, Oki dkk. (2020) dalam kajiannya di Kabupaten Belu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan tingkat kemandirian fiskal daerah sangat rendah dengan dominasi dana transfer pusat yang mencapai rata-rata 84,29 persen. Wardana dkk. (2021) meneliti hubungan PAD dengan kemandirian daerah di Nusa Tenggara Barat menggunakan data laporan realisasi PAD dan APBD tahun 2011–2018, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara PAD dan kemandirian daerah. Terakhir, Azhar (2023) menganalisis Kabupaten Banggai dengan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa rasio keuangan daerah masih sangat rendah, menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pusat. Seluruh penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan penelitian ini, sekaligus memperkuat relevansi dan orisinalitasnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal objek lokasi yang spesifik, yaitu Kabupaten Tanah Laut, serta penggunaan data realisasi PAD terbaru (2019–2023) untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap kemandirian keuangan daerah melalui pendekatan rasio fiskal yang lebih komprehensif.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanah Laut dengan pendekatan deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah. Berbeda dengan Saleh (2020), Malau dan Simarmata (2020), serta Wardana dkk. (2021) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan cakupan wilayah yang luas seperti provinsi atau beberapa kabupaten/kota sekaligus, penelitian ini berfokus pada satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar namun tingkat kemandirian keuangannya masih rendah. Penelitian ini juga menggunakan empat rasio keuangan daerah menurut Mahmudi (2019), yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas PAD, sebagai pendekatan untuk menilai kapasitas fiskal secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah baru dalam mengukur kemandirian keuangan daerah berbasis PAD pada wilayah yang belum banyak diteliti sebelumnya, sekaligus menawarkan alternatif pendekatan evaluatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah, serta mengidentifikasi tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Tanah Laut terhadap pemerintah pusat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

## **II. METODE**

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sugiyono (dalam Ardiansyah et al., 2023), menjelaskan bahwa metode kualitatif berbasis filsafat *postpositivisme* digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen.

Simangunsong (2016), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan desain penelitian disesuaikan dengan fenomena yang muncul di lapangan. penelitian kualitatif. Penelitian ini sebagaimana dijelaskan Nasution (dalam Hikmawanti, 2020), menegaskan bahwa manusia harus menjadi instrumen utama serta didukung dengan instrumen penunjang lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan model wawancara semistruktur. Moleong (Suwartono, 2014) menyebutnya dengan istilah wawancara berdasar petunjuk umum. Wawancara semistruktur dilakukan sebagai upaya menemukan permasalahan secara lebih terbuka, Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten tanah Laut, Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak, dan Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Analisis data dilakukan menggunakan teori menurut Mahmudi (2019), rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas PAD. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Boyolali.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai pelaksanaan otonomi melalui PAD, yang diukur dari perbandingan antara PAD dan Total Pendapatan Daerah (TPD). Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

##### a. Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 1.**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total
2019	46,690,546,865.00	9,291,225,414.00	4,875,963,913.00	108,928,493,337.69	<b>169.786.229.529.69</b>
2020	44,576,818,515.00	7,526,749,567.00	7,441,598,663.00	130,057,902.883.77	<b>189.603.069.628.77</b>
2021	43,638,422,656.00	5,743,153,528.80	9,836,676,685.00	146,917,377,825.75	<b>206.135.630.695.55</b>
2022	45,363,440,225.80	6,971,598,007.00	11,010,810,384.00	130,544,167,137.07	<b>193.890015.753.87</b>
2023	52,667,553,207.68	7,682,930,350.00	12,005,672,488.00	139,368,491,328.60	<b>211.724.647.374.28</b>

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

Pada Tabel 1, terlihat bahwa komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, sektor ini mencapai lebih dari Rp139 miliar dan terus meningkat sejak 2019, meskipun sempat menurun pada 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Januari 2025,

dijelaskan bahwa dominasi sektor ini disebabkan oleh luasnya cakupan sumber penerimaan, seperti dana hibah, denda administrasi, pelepasan aset, dan kontribusi BUMD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak (14 Januari 2025), yang menyebut bahwa variasi dan peningkatan pada sumber-sumber tersebut membuat sektor ini melampaui pajak daerah maupun retribusi dalam kontribusinya terhadap PAD.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah tetap memiliki peran signifikan, tren fluktuatif dari tahun ke tahun membuat kontribusinya belum stabil. Sebaliknya, sektor Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten dan strategis. Penulis menyimpulkan bahwa kebergantungan pada sektor ini mencerminkan perlunya strategi diversifikasi dan penguatan pajak daerah agar struktur PAD Kabupaten Tanah Laut menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal.

### b. Total Pendapatan Daerah

**Tabel 2.**  
**Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2019	1.871.337.390.246.69	20,1
2020	1.694.603.069.628.77	-9,4
2021	1.522.901.390.516.55	-10,1
2022	2.159.239.661.099.87	41,7
2023	2.259.475.998.716.28	4,6

Pada Tabel 2, total pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode 2018–2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 9,38 persen per tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan masing-masing sebesar 9,4 persen dan 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada 13 Januari 2025, penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi di seluruh wilayah, termasuk di Tanah Laut. Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB (14 Januari 2025) yang menyebutkan bahwa kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang terganggu.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan sementara akibat pandemi, pendapatan daerah kembali meningkat tajam pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 41,7 persen dan 4,6 persen. Penulis menyimpulkan bahwa pemulihan fiskal pasca-pandemi menunjukkan arah yang positif, didorong oleh upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan. Namun demikian, perlunya strategi antisipatif terhadap faktor eksternal seperti krisis ekonomi menjadi penting agar kestabilan pertumbuhan pendapatan daerah dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

Berikut adalah rumus untuk menentukan Rasio Derajat Desentralisasi:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut disajikan hasil perhitungan dari tahun 2019-2023:

$$2019 = \frac{169.786.229.529.65}{1.871.337.390.246.69} \times 100\% = 9,07\%$$

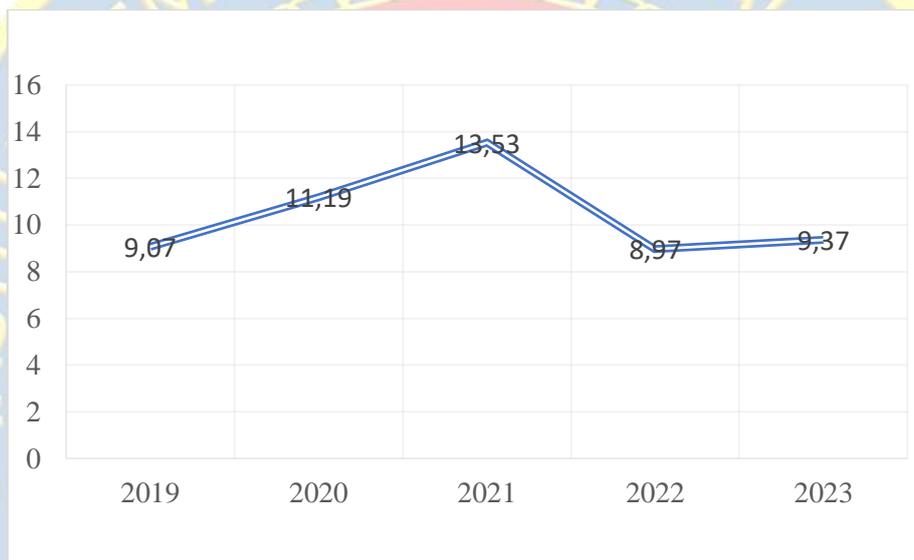
$$2020 = \frac{189.603.069.628.77}{1.694.033.788.482.77} \times 100\% = 11,19\%$$

$$2021 = \frac{206.135.630.695.55}{1.522.901.390.516.55} \times 100\% = 13,53\%$$

$$2022 = \frac{193.890.015.753.87}{2.159.239.661.099.87} \times 100\% = 8,97\%$$

$$2023 = \frac{211.724.647.374.28}{2.259.475.998.716.28} \times 100\% = 9,37\%$$

Penulis menyajikan hasil perhitungan tiap tahun dalam bentuk grafik dibawah ini:



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

**Gambar 1.**

**Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Pada Gambar 1, Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Tanah Laut selama periode 2019–2023 menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata sebesar 10,42 persen. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 13,53 persen, sementara terendah pada tahun 2022 sebesar 8,97 persen. Berdasarkan skala penilaian, angka ini tergolong dalam kategori "**kurang**", yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi melalui PAD masih terbatas.

Hasil wawancara dengan Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Laut (13 Januari 2025) mengungkapkan bahwa tantangan utama terletak pada belum optimalnya penggalian potensi PAD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah (14 Januari 2025), yang menegaskan bahwa banyak potensi PAD yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Data ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah, dan upaya penguatan kapasitas PAD perlu segera dilakukan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.

### 3.2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur sejauh mana suatu daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi rasionya, semakin besar tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

#### a. Pendapatan Transfer

**Tabel 3.**  
**Rasio Pendapatan Transfer Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Transfer	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	1.177.980.783.401.00	-
2019	1.425.729.934.305.00	21,03
2020	1.184.641.132.990.00	-16,9
2021	1.274.449.541.251.00	7,5
2022	1.963.205.983.275.00	54,1
2023	2.047.480.166.938.00	4,2

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

Berdasarkan Tabel 3, Pendapatan Transfer Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2018–2023 mengalami tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang turun sebesar 16,9 persen akibat dampak pandemi. Hasil wawancara dengan Kepala Bapenda (13 Januari 2025) mengungkapkan bahwa Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pembiayaan daerah, yang sangat menentukan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Laut. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD (14 Januari 2025), yang menyebutkan bahwa setiap tahun Tanah Laut menerima lebih dari satu hingga dua triliun rupiah dana transfer untuk membiayai kebutuhan daerah yang belum dapat ditutup oleh PAD.

Data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penulis menyimpulkan bahwa tanpa optimalisasi sumber PAD, keberlanjutan pembangunan dan kemandirian fiskal akan terus bergantung pada kebijakan transfer pusat, yang bersifat fluktuatif dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh daerah.

#### b. Total Pendapatan Daerah

**Tabel 4.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2019	1.497.286.640.603,62	1.871.377.390.246.69	124,98%
2020	1.514.629.916.689,00	1.694.033.788.482.77	111,83%
2021	1.392.339.474.407,00	1.903.701.390.516.55	136,74%
2022	1.717.636.708.676,00	2.159.239.661.099.87	125,69%
2023	1.739.292.358.915,00	2.259.475.998.716.28	129,92%

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

Pada Tabel 4, target pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023, dengan penurunan signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, khususnya 2022 dan 2023, kondisi ekonomi membaik dan target pendapatan kembali meningkat. Realisasi pendapatan daerah setiap tahun selalu melampaui target, didominasi oleh Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi lebih kecil.

Dari hasil wawancara, penetapan target pendapatan daerah harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas daerah. PAD dianggap lebih fleksibel untuk dioptimalkan dibanding Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi PAD menjadi kunci dalam mendorong kemandirian keuangan daerah.

Berikut adalah rumus untuk menentukan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut disajikan hasil perhitungan dari tahun 2019-2023:

$$2019 = \frac{1.425.729.934.305.00}{1.871.337.390.246.69} \times 100\% = 76,18\%$$

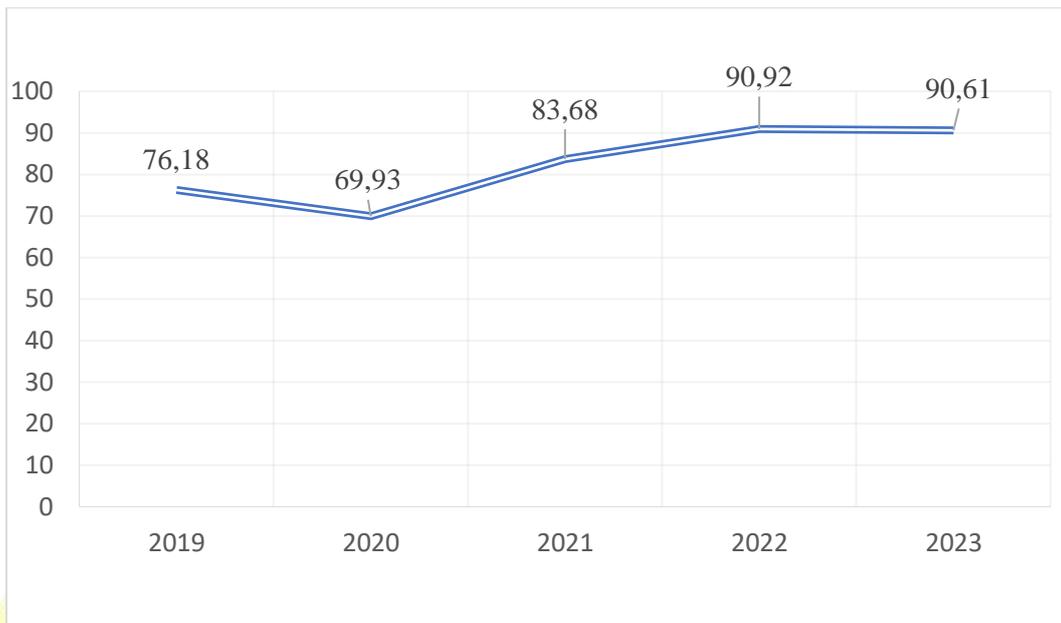
$$2020 = \frac{1.184.641.132.990.00}{1.694.033.788.482.77} \times 100\% = 69,93\%$$

$$2021 = \frac{1.274.449.541.251.00}{1.522.901.390.516.55} \times 100\% = 83,68\%$$

$$2022 = \frac{1.963.205.983.275.00}{2.159.239.661.099.87} \times 100\% = 90,92\%$$

$$2023 = \frac{2.047.480.166.938.00}{2.259.475.998.716.28} \times 100\% = 90,61\%$$

Penulis menyajikan hasil perhitungan tiap tahun dalam bentuk grafik dibawah ini:



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

**Gambar 2.**  
**Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Pada Gambar 2, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 2019–2023 rata-rata mencapai 82,26%, dengan tren yang cenderung meningkat kecuali penurunan sekitar 7% pada tahun 2020. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, akibat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang masih rendah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bapenda dan Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD pada Januari 2025 mengonfirmasi kondisi tersebut. Keduanya menyatakan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih ditopang oleh dana transfer, karena PAD belum cukup untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut masih belum tercapai optimal.

### **3.3. Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur sejauh mana suatu daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi rasionya, semakin besar tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 5.**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2019	169,786,229,529.69	1.529.922.060.481,93	11,09
2020	189,603,069,628.77	1.535.660.520.668,00	12,34
2021	206,135,630,695.55	1.894.067.926.592,83	10,87
2022	193,890,0115,753.87	1.863.861.922.192,92	10,40
2023	211,724,647,374.28	2.243.487.402.992,00	9,43

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

Berdasarkan Tabel 5, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode 2019–2023 tidak pernah melebihi angka 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Laut menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena PAD yang diperoleh belum mencukupi dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak (14 Januari 2025) yang menegaskan bahwa belanja daerah sebagian besar masih ditopang oleh pendapatan transfer. Penulis menyimpulkan bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah menjadi indikator bahwa Kabupaten Tanah Laut belum mencapai kemandirian fiskal yang ideal dan masih sangat tergantung pada dukungan fiskal eksternal untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

#### **b. Pendapatan Transfer**

**Tabel 6.**  
**Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2019	1.425.729.934.305.00	1.529.922.060.481,93	93,18
2020	1.184.641.132.990.00	1.535.660.520.668,00	77,14
2021	1.274.449.541.251.00	1.894.067.926.592,83	67,28
2022	1.963.205.983.275.00	1.863.861.922.192,92	105,33
2023	2.047.480.166.938.00	2.243.487.402.992,00	91,26

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

Pada Tabel 6, terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2019–2023 selalu berada di atas 65 persen. Hal ini menunjukkan dominasi Pendapatan Transfer sebagai sumber utama pembiayaan belanja pemerintah daerah. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Bapenda menyatakan bahwa meskipun upaya peningkatan PAD terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan, hingga kini PAD masih belum mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja daerah secara mandiri.

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD (14 Januari 2025), yang menegaskan bahwa tanpa optimalisasi PAD, ketergantungan terhadap dana pusat akan terus berlanjut. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya menuju kemandirian keuangan, Kabupaten Tanah Laut masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, dan belum mampu menggeser peran dominan dana pusat dalam struktur pembiayaan belanjanya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut disajikan hasil perhitungan dari tahun 2019-2023:

$$2019 = \frac{169.786.229.529.65}{1.425.729.934.305.00} \times 100\% = 11,90\%$$

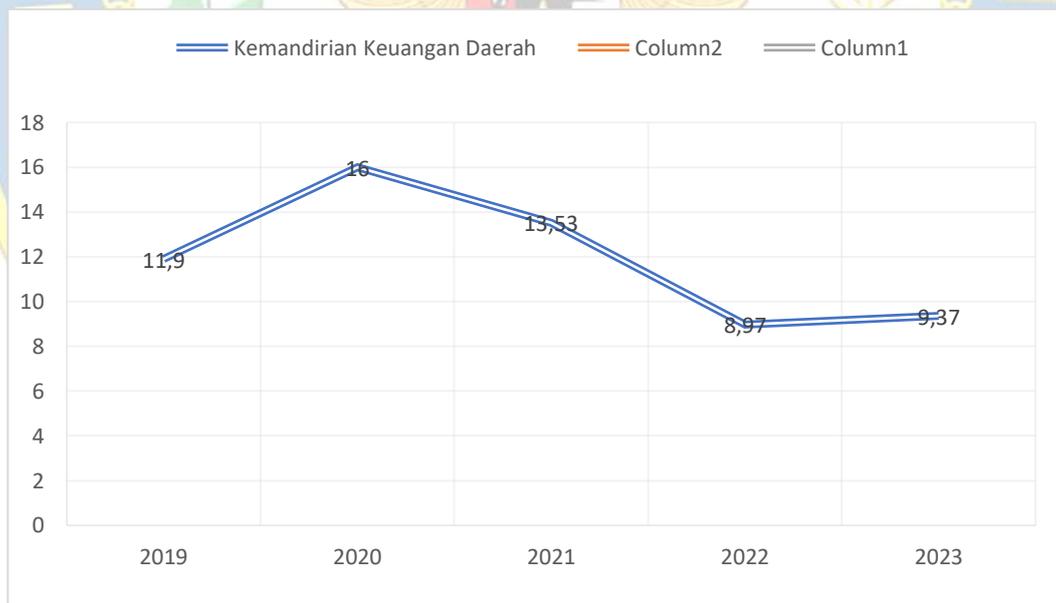
$$2020 = \frac{189.603.069.628.77}{1.184.641.132.990.00} \times 100\% = 16\%$$

$$2021 = \frac{206.135.630.695.55}{1.274.449.541.251.00} \times 100\% = 13,53\%$$

$$2022 = \frac{193.890.015.753.87}{1.963.205.983.275.00} \times 100\% = 8,97\%$$

$$2023 = \frac{211.724.647.374.28}{2.047.480.166.938.00} \times 100\% = 9,37\%$$

Penulis menyajikan hasil perhitungan tiap tahun dalam bentuk grafik dibawah ini:



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

**Gambar 3.**

**Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Pada Gambar 1, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode 2019–2023 menunjukkan tren fluktuatif. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 16%, sementara pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan hanya

meningkat tipis 0,40% pada 2023. Rata-rata rasio selama lima tahun terakhir berada pada angka 11,95%. Berdasarkan skala penilaian, nilai ini termasuk dalam kategori "**sangat rendah**" dengan pola hubungan **instruktif**, artinya dominasi pembiayaan pemerintahan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Bapenda menyatakan bahwa meskipun realisasi PAD telah mencapai target, kontribusinya terhadap belanja daerah masih kecil dibandingkan Pendapatan Transfer. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak (14 Januari 2025), yang menekankan bahwa PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, belum optimal. Penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Tanah Laut belum mencapai kemandirian keuangan karena PAD masih belum mampu menutup kebutuhan belanja secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi.

### 3.4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

#### a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 7.**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	128.454.735.520.36	-
2019	169.786.229.529.69	32,17
2020	189.603.069.628.77	11,67
2021	206.135.630.695.55	8,73
2022	193.890.0115.753.87	-5,94

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

Berdasarkan Tabel 7, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 32,17%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 5,94% dibanding tahun sebelumnya. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak menyebutkan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh transisi ke masa new normal pasca-pandemi, yang membatasi aktivitas masyarakat dan menghambat proses pemungutan PAD.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB (14 Januari 2025), yang menjelaskan bahwa meskipun secara umum realisasi PAD terus meningkat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal, pada tahun 2023 penerimaan PAD tidak mencapai target akibat kendala pemulihan pasca-pandemi. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tren positif dalam realisasi PAD, dampak new normal masih menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian, dan perlu strategi pemulihan yang lebih adaptif di masa mendatang.

#### b. Target Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 8.**  
**Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2018	126.109.254.349,41	-
2019	155.187.372.673,62	23,05
2020	175.534.277.786,00	13,11
2021	167.212.726.505,00	-4,74
2022	155.994.346.605,00	-6,70
2023	215.796.462.766,00	38,33

Sumber: LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

Pada Tabel 8, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2023. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 36,16 persen pada 2019–2020, penurunan sebesar 11,44 persen pada 2021–2022, dan kembali naik tajam sebesar 38,33 persen pada tahun 2023. Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak menjelaskan bahwa peningkatan target PAD biasanya terjadi ketika potensi pendapatan terukur dengan baik dan target tahun sebelumnya berhasil direalisasikan. Sebaliknya, jika realisasi tidak tercapai, maka target tahun berikutnya akan disesuaikan turun.

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB (14 Januari 2025), yang menyebut bahwa penetapan target PAD dilakukan melalui rapat bersama antara Badan Anggaran, Bapenda, dan Bupati, dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil potensi pendapatan di lapangan. Penulis menyimpulkan bahwa fluktuasi target PAD mencerminkan perlunya perencanaan yang lebih akurat dan optimalisasi potensi lokal agar target yang ditetapkan realistis namun tetap mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berdasar indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut disajikan hasil perhitungan dari tahun 2019-2023:

$$2019 = \frac{169.786.229.529.69}{155.187.372.673,62} \times 100\% = 109,40\%$$

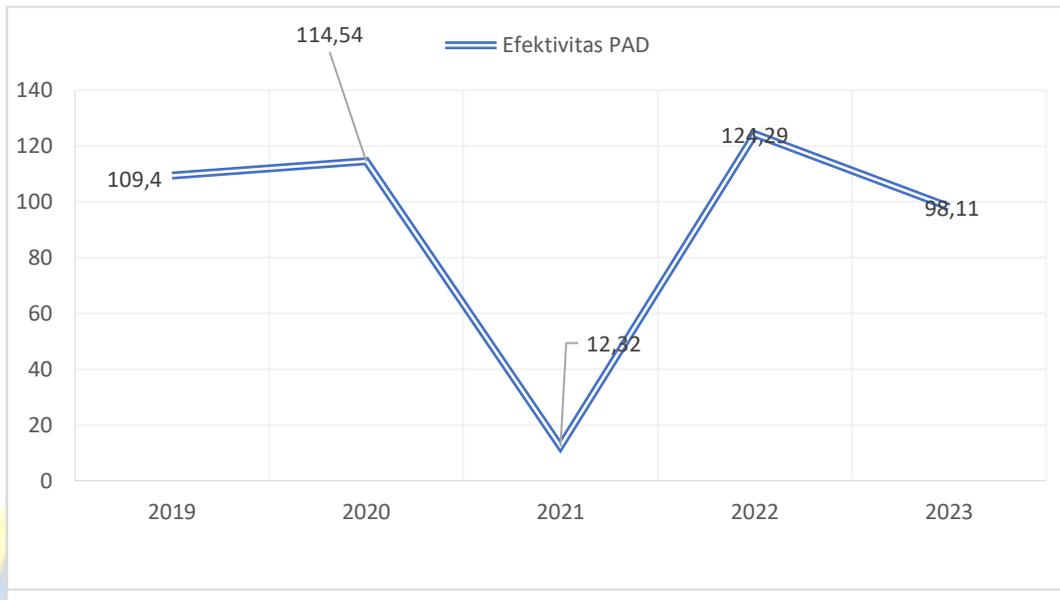
$$2020 = \frac{189.603.069.628.77}{175.534.277.786,00} \times 100\% = 114,54\%$$

$$2021 = \frac{206.135.630.695.55}{167.212.726.505,00} \times 100\% = 12,32\%$$

$$2022 = \frac{193.890.015.753.87}{155.994.346.605,00} \times 100\% = 124,29\%$$

$$2023 = \frac{211.724.647.374.28}{215.796.462.766,00} \times 100\% = 98,11\%$$

Penulis menyajikan hasil perhitungan tiap tahun dalam bentuk grafik dibawah ini:



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Tanah Laut 2019-2023

**Gambar 4.**  
**Grafik Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023**

Pada Gambar 4, Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Laut selama periode 2019–2023 menunjukkan variasi, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2022 yang melampaui 100 persen. Namun, pada 2021 terjadi penurunan drastis ke angka 12,32 persen, dan pada 2023 berada di angka 98,11 persen. Rata-rata efektivitas selama lima tahun mencapai 91,73 persen, yang berada dalam kategori “sesuai target” menurut skala penilaian efektivitas PAD.

Dalam wawancara pada 13 Januari 2025, Kepala Bapenda menjelaskan bahwa realisasi PAD secara umum telah sesuai target, kecuali pada tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak (14 Januari 2025) yang menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi yang terganggu menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

Penulis menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan PAD sudah berjalan cukup efektif, hal tersebut belum cukup untuk mendorong kemandirian fiskal secara penuh. Dari empat rasio keuangan yang dianalisis menurut Mahmudi, hanya rasio efektivitas yang menunjukkan hasil positif, sementara tiga rasio lainnya menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut masih belum mandiri secara keuangan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut masih tergolong rendah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Oki dkk.

(2020) di Kabupaten Belu yang juga menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Seperti halnya Kabupaten Belu, Kabupaten Tanah Laut belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 20 persen. Namun, berbeda dari penelitian Oki dkk., penelitian ini menambahkan bahwa tidak hanya keterbatasan potensi fiskal, tetapi juga kurang optimalnya strategi peningkatan PAD menjadi faktor penghambat utama.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian oleh Azhar (2023) di Kabupaten Banggai, yang menunjukkan rendahnya rasio kemandirian akibat ketidakseimbangan antara realisasi PAD dan kebutuhan belanja daerah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menggunakan empat rasio keuangan menurut Mahmudi, dan menunjukkan bahwa meskipun rasio efektivitas PAD tergolong baik, tiga rasio lainnya—derajat desentralisasi, ketergantungan fiskal, dan rasio kemandirian—masih berada pada kategori rendah. Ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai ketergantungan struktural keuangan daerah.

Berbeda dengan studi oleh Saleh (2020) dan Malau & Simarmata (2020) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan mencakup wilayah lebih luas, penelitian ini berfokus pada satu daerah spesifik dan mengungkap dinamika yang lebih kontekstual melalui data keuangan 2019–2023 serta hasil wawancara mendalam dengan pejabat daerah. Penelitian ini menekankan bahwa fluktuasi target dan realisasi PAD seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, tetapi juga oleh pendekatan yang kurang sistematis dalam menggali potensi pajak dan retribusi.

Temuan penelitian ini juga memperkaya studi oleh Wardana dkk. (2021) yang menilai hubungan antara PAD dan kemandirian keuangan di NTB. Penelitian ini menambahkan dimensi bahwa efektivitas PAD bukan satu-satunya indikator keberhasilan fiskal. Ketergantungan terhadap dana transfer dan lemahnya strategi diversifikasi pendapatan menjadi isu yang lebih mendasar, khususnya di daerah yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola maksimal, seperti Tanah Laut.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian kemandirian fiskal daerah dengan menyoroti pentingnya pendekatan strategis dan terpadu dalam penguatan PAD. Upaya ini mencakup perencanaan target yang realistis, penguatan kapasitas aparatur pemungut pajak, serta peningkatan peran sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan perkebunan yang selama ini belum diberdayakan secara optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya sinergi antara Bapenda, legislatif daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan tiga faktor utama yang menghambat kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Laut, yaitu rendahnya perolehan PAD, database pajak daerah yang belum mutakhir, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya PAD disebabkan oleh kurang optimalnya pemungutan pajak dari sektor potensial seperti kuliner malam dan pariwisata, keterbatasan regulasi daerah, serta kendala fasilitas dan SDM. Selain itu, data pajak yang tidak akurat dan belum terintegrasi menyebabkan pengelolaan perpajakan tidak

efisien. Tingginya tunggakan dari pajak hotel dan air tanah juga menunjukkan lemahnya kepatuhan, meskipun wajib pajak telah memahami kewajibannya.

Upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berfokus pada tiga strategi utama: meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, mengembangkan potensi sumber PAD baru, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemungutan pajak dioptimalkan melalui digitalisasi sistem, peningkatan pengawasan wajib pajak, serta perluasan kanal pembayaran seperti melalui aplikasi dan gerai retail. Potensi PAD baru juga digali dari sektor ekonomi kreatif, jasa, dan aset daerah yang belum produktif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan dengan menyediakan akses informasi publik dan sistem pelaporan digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan mendorong terciptanya kemandirian keuangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Laut masih tergolong rendah. Hal ini dianalisis melalui empat indikator rasio keuangan menurut Mahmudi. Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan angka rata-rata 10,42%, menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mencapai rata-rata 82,26%, memperlihatkan dominasi pendapatan transfer dalam struktur keuangan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada angka 11,95%, mengindikasikan bahwa hubungan keuangan Kabupaten Tanah Laut dengan pemerintah pusat masih bersifat instruktif. Sementara itu, Rasio Efektivitas PAD mencapai 91,73%, menunjukkan bahwa pengelolaan PAD cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal untuk mencapai kemandirian fiskal.

Terdapat tiga faktor utama yang menghambat pencapaian kemandirian keuangan daerah, yaitu: rendahnya perolehan PAD akibat belum optimalnya sektor-sektor potensial, ketidakmutakhiran database pajak yang menghambat akurasi pemungutan, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari tingginya tunggakan pada jenis pajak utama seperti pajak hotel dan air tanah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah meliputi: penerapan digitalisasi dan kanal pembayaran modern untuk mempermudah pemungutan pajak; peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; pengembangan sumber-sumber PAD baru dari sektor pariwisata, jasa, dan aset daerah; serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berbasis sistem dan keterbukaan informasi publik. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mendukung strategi ini.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wawancara serta ketersediaan data sekunder terkait efisiensi pengelolaan anggaran berbasis sektoral, yang dapat memperkuat analisis komparatif antar sektor PAD.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan untuk mengkaji efektivitas kebijakan peningkatan PAD berdasarkan sektor-sektor dominan secara lebih mendalam, serta meneliti perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks strategi pencapaian kemandirian fiskal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Azhar, R. F. (2023). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Sustainability (Switzerland)*.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Bargain, O. B., Caldeira, E., & Vincent, R. C. (2023). Shine a (night)light: Decentralisation and economic development in Burkina Faso. *ODI Working Paper.*, 187(November 2024), 106851. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106851>
- Haslam McKenzie, F. M., & Eyles, S. (2024). Future-proofing a local government authority for a post-mining future. *Geographical Research*, 62(2), 293–308. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12634>
- Hikmawanti, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (ed. 4 cet.1). UPP STIM YKPN.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Muhlisin, Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). How Impact Fiscal Decentralization to Sectoral Change and Local Inequality? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 379–389. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200134>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. <https://doi.org/978-602-7825-08-6>
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Wardana, M. D., Mahsuni, A. W., & Afifudin. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(2), 28–39.